

Peran Ruang Luar Biasa di Pengadilan Kamboja Untuk Mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khmer Merah di Kamboja

¹Sandhika Indra W, ²Tubagus Edya R.M
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
¹ddhik69@gmail.com, ²tbedyarm766@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 2, No: 1, Januari 2024 Halaman : 31-36	Conflicts often occur when two or more interests conflict and no one wants to concede. The variety of conflicts that we know today, from conflicts that have existed since time immemorial such as conflicts between tribes to more modern conflicts such as one country taking advantage of another country. The way conflicts are resolved also varies according to the type of conflict, large conflicts such as conflicts between countries or one that attracts world attention, using more complex resolutions and usually using third parties. Therefore, a special organization will be formed to resolve a conflict. One organization formed to resolve conflicts is the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) aimed at prosecuting war criminals during the Khmer Rouge era for crimes against humanity in 1975-1979. The crimes against humanity that occurred in Cambodia are one of the greatest humanitarian tragedies in the modern era after World War II. The ECCC was established because at that time the Cambodian National Judicial Institution was unable to prosecute perpetrators of crimes against humanity. The Cambodian government and the UN at that time agreed to establish a judicial institution specifically aimed at handling and resolving the Khmer Rouge Case.

Keywords:
Khmer Rouge
Cambodia
Genosida

Abstrak

Konflik sering terjadi ketika dua kepentingan atau lebih bertentangan dan tidak ada yang ingin mengakui. Beragam konflik yang kita kenal saat ini, dari konflik tersebut sudah ada sejak dahulu kala seperti konflik antar suku hingga konflik yang lebih modern seperti suatu negara memanfaatkan negara lain. Cara penyelesaian konflik juga bermacam-macam menurut jenis konfliknya, konflik besar seperti konflik antar negara atau yang satu menarik perhatian dunia, menggunakan resolusi yang lebih kompleks dan biasanya menggunakan pihak ketiga. Oleh karena itu, akan dibentuk organisasi khusus untuk menyelesaikan suatu konflik. Satu organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik adalah Kamar Luar Biasa di The Pengadilan Kamboja (ECCC) bertujuan untuk mengadili para penjahat perang pada masa Khmer Merah kejadian kejahatan kemanusiaan pada tahun 1975-1979. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Kamboja adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern pasca Perang Dunia ke-2. ECCC ini adalah didirikan karena pada saat itu Lembaga Peradilan Nasional Kamboja tidak dapat mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan. Pemerintah Kamboja bersama PBB saat itu sepakat untuk mendirikan lembaga peradilan yang khusus bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan Kasus Khmer Merah.

Kata Kunci: Khmer Merah, Kamboja, Genosida

PENDAHULUAN

Gerakan Komunis di Kamboja telah muncul sejak masa penjajahan Perancis pada tahun 1940-an; gerakan ini terinspirasi dari Gerakan komunis Vietnam di bawah Penjajahan Perancis saat itu. Kemudian, Perang Indochina terjadi pada tahun 1950an, dianggap memicu komunisme semangat di Kamboja dan Vietnam. Selanjutnya dipimpin oleh Partai Komunis Kampuchea oleh pemimpin diktator, Pol Pot. Kamboja Partai Komunis memulainya pergerakan dan berbasis di tengah hutan dan didaerah

pegunungan di bagian Timur Laut Kamboja. Partai sebelumnya hanya punya beberapa pengikut kemudian berubah menjadi satu dengan kekuatan besar ketika Lon Nol digulingkan pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk.

Partai Komunis Kamboja bersatu dengan Norodom Sihanouk untuk bertarung melawan pemerintahan Lon Nol dan berhasil mengalahkan pemerintah. Dia menandai awal dari Pol Pot rezim pemerintahan, yang disebut Khmer Merah era pemerintahan. Saat itu, Pol Pot berusaha menciptakan utopia agraria di Kamboja sehingga dia menutup Kamboja dari dunia internasional dan berusaha untuk membangun kembali Kamboja dari nol. Dia menghapus mata uang dan agama dari Kamboja, memimpin warga Kamboja dari perkotaan ke pedesaan dan memaksa mereka melakukan hal tersebut bertani dan beternak sapi secara tidak manusiawi, digilirannya mengakibatkan dua juta kematian kelelahan, penyakit, dan penganiayaan dilakukan oleh pasukan Khmer Merah melawan warga sipil Kamboja.

Ditemukan fakta bahwa Rezim Khmer Merah juga berkomitmen pemusnahan besar-besaran atau genosida Etnis Vietnam yang tinggal di Kamboja dan kelompok Muslim di Kamboja. Itu pemusnahan ras Vietnam disebabkan Kebencian terhadap rezim Khmer Merah etnis ini karena pada waktu itu Kamboja sedang berkonflik dengan Vietnam terkait dengan komunisme yang mereka anut. Sementara itu, pemusnahan umat Islam disebabkan oleh kebencian mereka terhadap umat Islam dianggap sebagai agama reaksioner yang menolak banyak kebijakan yang dikembangkan oleh Pol Pot, sehingga dianggap menghambat perkembangan komunisme berusaha menjadi dibangun oleh rezim Khmer Merah ini.

Masa kegelapan berakhir pada tahun 1979 ketika Vietnam berhasil mengalahkan Khmer Rouge, jadi elit Khmer Merah terasing dari hutan. Para pejabat dari Khmer Merah berhasil ditangkap satu persatu. Namun, proses keadilan terhadap tersangka tidak dapat berjalan dengan baik karena Keadilan Nasional Kamboja Kelembagaan dinilai kurang kuat..Oleh karena itu, seringkali elit Khmer Merah tidak melakukan hal tersebut hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, akhirnya Kamboja pemerintah meminta PBB untuk membantu menemukan lembaga peradilan untuk menangani dan mengadili Elit Khmer Merah, ECCC. Anggota ruang hakim hanya terdiri dari warga Kamboja pada pemerintah Kamboja permintaan, dan ditambah dengan penegak hukum sejenisnya hakim dan tim penyidik dari lembaga peradilan internasional. Itu anggota lembaga diharapkan mewakili rakyat Kamboja hingga saat ini merasa trauma akibat apa yang dilakukan Khmer Rouge telah melakukannya di masa lalu.

Berdasarkan hasil penjelasan pada latar belakang diatas, ini dibuat untuk menjelaskan masalahnya mengenai kejahatan Genosida yang memusnahkan kelompok muslim di Kamboja pada penjajahan Khmer Merah.

Kejahatan genosida yang terjadi di Kamboja pada masa penjajahan Khmer Merah merupakan peristiwa tragis yang menargetkan kelompok muslim. Identifikasi masalah dalam konteks ini melibatkan sejumlah aspek kritis:

Kejahatan genosida Khmer Merah terhadap kelompok muslim menciptakan masalah serius terkait dengan kebijakan pemerintah yang secara sistematis mengarah pada pemusnahan kelompok ini. Pertanyaan mendasar melibatkan motivasi, alasan, dan metode pelaksanaan genosida tersebut.

Identifikasi karakteristik khusus dari kejahatan genosida ini penting untuk memahami sejauh mana dampaknya. Skala dari genosida ini, termasuk jumlah korban yang terkena dampak, menjadi aspek kritis yang perlu diidentifikasi.

Proses penegakan hukum terkait genosida ini menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi pembentukan lembaga peradilan hingga kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Identifikasi tantangan ini dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas proses peradilan.

Identifikasi masalah ini diharapkan dapat membantu menyusun pendekatan penelitian yang komprehensif dan memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan kejahatan genosida terhadap kelompok muslim selama penjajahan Khmer Merah di Kamboja.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendalami pemahaman terkait motivasi dan alasan di balik kebijakan pemerintah Khmer Merah yang mengarah pada genosida terhadap kelompok muslim. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan pemikiran di balik keputusan sistematis untuk memusnahkan kelompok ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik khusus dari pelaksanaan kejahatan genosida terhadap kelompok muslim oleh Khmer Merah. Ini mencakup identifikasi metode pelaksanaan, strategi, dan taktik yang digunakan dalam pemusnahan kelompok ini.

Tujuan penting penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana skala dari kejahatan genosida Khmer Merah terhadap kelompok muslim. Penelitian ini akan berfokus pada mengidentifikasi jumlah korban yang terkena dampak serta dampaknya terhadap kelompok dan masyarakat Kamboja secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kejahatan genosida Khmer Merah terhadap kelompok muslim di Kamboja, dengan fokus pada motivasi, metode pelaksanaan, dampak, serta tantangan dan respons dalam penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Melalui pendekatan ini, data yang disajikan dalam artikel terwujud dalam bentuk kalimat-kalimat. Pilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang sedang diselidiki.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi kepustakaan. Dalam proses ini, penulis mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, kebijakan, dan situs web resmi. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan penulis untuk merinci informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan, penulis dapat menggali pemahaman yang mendalam tentang peristiwa yang diulas dalam artikel jurnal ini. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih kompleks dan kontekstual terhadap data yang dikumpulkan, memungkinkan penelitian untuk memberikan kontribusi pemahaman yang substansial terhadap topik yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pemerintahan Khmer Merah di Kamboja

Khmer Merah didirikan pada tahun 1960an di bawah kepemimpinan Pol Pot. Ini organisasinya adalah Komunis Kampuchea Sayap Partai yang merupakan pengganti istilah untuk kata "Kamboja" (BBC, 2019). Di awal periode berdirinya, Khmer Merah bukanlah sebuah organisasi yang terdengar kuat aneh bagi mereka yang tinggal di Kamboja daerah perkotaan. Oleh karena itu, Khmer Merah di dalamnya periode awal tidak mengalami signifikan maju.

Dalam upaya mendominasi Kamboja, perjalanan Khmer Merah dimulai dengan Pangeran Norodom Sihanouk dulu digulingkan dari posisinya sebagai kepala negara Kamboja. Sejak kemerdekaan pada tahun 1954, Norodom Sihanouk ditugaskan menjadi pemimpin Kamboja ketika partai politiknya bernama Sangkum mendapatkan kembali dominasinya setelah memenangkan pemilihan parlemen di 1955 (A.J Dommen, 2001). Pemerintahannya yang panjang disebabkan oleh beberapa hal menyebabkan. Pada tahun 1963 dia memaksa Nasional Kamar Kamboja untuk menyetujui sebuah amandemen konstitusi terkait dengan itu masa jabatan, yang hasilnya menjadikannya Kepala Negara tanpa jabatan tetap.

Perang Indochina kedua atau disebut Perang Vietnam terjadi pada tahun 1955, berlangsung selama hampir 20 tahun. Perang ini berhasil Sihanouk kesulitan dalam menyeimbangkan haknya dan sayap kiri. Pada pemilu tahun 1966, Kebijakan politik Sangkum menyatakan hal itu setiap distrik mungkin memiliki satu kandidat hanya diabaikan. Efek dari sayap kiri adalah semakin kuat, dan Lon Nol terbentuk seorang aktivis sayap kanan menjadi Perdana Menteri (B. Kiernan, 2004). Pada tahun 1969, Lon Nol dan pengikut sayap kanan merasa kecewa dan frustrasi ketika Sihanouk mengeluarkannya kebijakan untuk menoleransi Viet Cong dan Vietnam kegiatan Prajurit Rakyat di Kamboja perbatasan, dan mereka tidak dapat menerimanya.

Pada tahun 1970, kembali setelah berkunjung Peking dan Moskow, Sihanouk dulu digulingkan dari jabatannya sebagai Ketua Negara oleh Lon Nol dan Sisowath Sirik Matak. Namun, dalam kudeta ini

Sihanouk tidak dibunuh oleh Lon Nol dan rekannya kroni-kroninya, dan setelah itu mereka mendirikan Republik Khmer (R. R. Ross, 1990). Mengetahui hal ini, Khmer Merah berusaha mendekati Norodom Sihanouk dan mencoba bersatu dengan dia. Sihanouk, saat itu sedang bepergian ke Beijing, direkomendasikan oleh Tiongkok untuk menentang kudeta yang dilakukan Lon Nol dan mengambil alih pemerintahan lagi.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, sebuah pembebasan gerakan bernama "Nasional Kamboja Front Persatuan untuk Keamanan Nasional" adalah diciptakan untuk membebaskan rakyat Kamboja dari Kekejaman Khmer Merah kemudian terungkap KNUFNS. Gerakan ini didirikan pada 3 Desember 1978 dan dipimpin oleh Heng Samrin merupakan salah satu pemimpin pemberontakan melawan Khmer Merah. Gerakan ini adalah didukung oleh Vietnam karena itu perselisihan dengan Kamboja di perbatasan negara sejak tahun 1977. Upaya Kudeta adalah kemudian diambil alih oleh gerakan KNUFNS itu akhirnya berhasil merebut Phnom Penh Modal dan menggulingkan kekuasaan Pol Pot sama sekali pada bulan Januari 1979. Setelah disita Kota Phnom Penh dan menggulingkan Pol Pot, Heng Samrin menjadi pemimpin Kamboja. Dia mengakhiri pemerintahan Khmer Merah dan menggantinya dengan Heng Samrin dan Hun pemerintahan Sen.

B. Pengaruh Pemerintahan Khmer Merah di Kamboja

Empat tahun pemerintahan Khmer Merah memberikan beberapa dampak pada Kamboja. Selama memerintah Kamboja, Khmer Merah berkembang kebijakan politik yang mempengaruhi etnis dan agama di Kamboja, khususnya etnis minoritas seperti Muslim Cham dan Malaya.

Penindasan yang dilakukan oleh Khmer Pemerintahan Rouge tidak dapat dipisahkan dari etnis perbedaan yang ingin dilakukan Khmerisasi. Puncak dari kebijakan menindas etnis lain selain Khmer etnis adalah pemberontakan yang terjadi pada bulan Juli 1978 sebagai respon masyarakat terhadap Khmer pemerintahan Rouge. Tentu saja kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi kondisi umat beragama di Kamboja pada waktu itu dan hingga saat ini. Pada tanggal 5 Januari 1976, Khmer Merah pemerintahan meratifikasi Kampuchea Demokrat Konstitusi yang mengatur landasan negara, ekonomi, budaya, dan agama. Itu kebijakan yang mengatur agama di Kamboja adalah diatur dalam Bab 15, berbunyi: "Setiap warga Kamboja diperbolehkan melakukan hal tersebut beribadah menurut agama apa pun dan apa adanya tidak diperbolehkan melakukan ibadah menurut agama lain" Semua agama reaksioner mengancam Kampuchea Demokrat dan Kamboja orang dilarang keras (DK Constitution:1953).

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah Populasi Kamboja adalah Killing Field merupakan dampak dari Rencana Empat Tahun program di mana Khmer Merah mengajukan banding kolektivisasi atas semua properti pribadi seperti pertanian padi dan menempatkan prioritas nasional pada penanaman padi. Semua warga negara harus melakukannya menyerahkan benda pribadinya untuk digunakan secara kolektif. Mereka dipaksa bekerja lebih banyak dari 12 jam sehari tanpa istirahat yang cukup dan makanan¹. Tragedi Killing Field telah merenggut banyak nyawa korban jiwa akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Khmer Merah. Mereka mengeksekusi yang dicurigai, tidak berguna, dan berbahaya. Selain itu mereka juga mengeksekusi mantannya tentara, pegawai negeri, dan pemerintah staf Lon Nol. Banyak orang Kamboja menjadi korban rezim Pol Pot pembunuhan, seperti yang ditunjukkan dengan sensus demografi tahun 1970 menunjukkan penurunan jumlah penduduk dari 7 jutaan hingga 4 juta orang selama Khmer pemerintahan Rouge (Setyawan, Heru, 2007).

C. Sejarah Berdirinya ECCC

Khmer Merah adalah kejahatan yang dilawan kemanusiaan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia pelanggaran dan diakui secara internasional. Selain internasional Pelanggaran hak asasi manusia, anggota Khmer Merah juga didakwa melakukan genosida terhadap dua kelompok: Kelompok Muslim dan Vietnam yang tinggal di Kamboja. Mahkamah Internasional (ICJ). Namun karena kejahatan

¹ Cambodia tribunal Monitor. "Chronology of the Khmer Rouge Movement".

<https://www.cambodiatribunal.org/history/cambodian-history/chronology-of-the-khmer-rouge-movement/> (accessed on June 9, 2019).

terjadi di Kamboja, Kamboja berhak memegang proses mencoba dalam upaya memikul tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman kepada warganya.

Ruangan Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (ECCC) adalah salah satu keadilan institusi di Kamboja dibantu oleh lembaga peradilan internasional dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengertiannya keanggotaan. Intervensi dilakukan dengan ini lembaga internasional membangun ketidakmampuan Kamboja dalam menyelesaikan permasalahan Manusia benar masalah di negaranya.

Gagasan pembentukan pengadilan pidana tingkat internasional dibangun di Tokyo dan Pengadilan Nuremberg didirikan setelah pecahnya Perang Dunia ke-2 bertujuan untuk mencoba penjahat perang di daerah tertentu dan memang begitu efektif untuk sementara. Salah satu institusi didirikan pada saat itu adalah Internasional Pengadilan Kriminal untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) bermaksud mengadili para penjahat tersebut Konflik Yugoslavia. Keberhasilan ICTY menjalankan tugasnya kemudian diikuti dengan pendirian serupa lembaga yang menangani kasus yang terjadi diberbagai daerah, misalnya etnis konflik di Rwanda, menginspirasi pembentukan pengadilan Ad Hoc bernama Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR).

D. Peran ECCC dalam Menangani Kasus Khmer Merah

Sejak didirikan pada tahun 2003, ECCC telah berhasil melakukan berbagai hal yang bermanfaat penyelidikan menghasilkan daftar tersangka nama-nama yang mungkin menjadi dalangnya Kejahatan kemanusiaan Khmer Merah di masa lalu.

Penanganan kasus Kaing Guek Eav adalah keberhasilan pemenjaraan ECCC yang pertama pelaku sejak awal berdirinya pada tahun 2003. Namun, tidak semua upaya pengadilan dilakukan oleh ECCC membuahkan hasil. Upaya dilakukan oleh ECCC pada tahun 2014 sia-sia. Luar negeri Menteri Khmer Merah, Ieng Sary, meninggal pada tahun 2014, sebelum hakim mengeluarkan putusan pengadilannya dakwaan. Sementara itu, dua lainnya tersangka, Khieu Samphan dan Nuon Chea, melakukan proses pengadilan bersama dengan Ieng Sary terus melanjutkan proses persidangan dan baru diputuskan bersalah aksi genosida pada tahun 2018.

Oleh karena itu, selidiki dan cari yang baru nama tetap dilakukan meski tidak ada yang baru nama yang muncul menjadi tersangka sampai Hari ini. Itu karena ECCC tidak bisa bertindak sembarangan dalam menetapkan tersangka kejahatan yang akan mempersulit hukum ini pekerjaan institusi. Lebih-lebih lagi, beberapa sarjana menulis biografi Pol Pot dan rezimnya. sarjana bernama Philip Short menyatakan hal itu Rezim Khmer Merah tidak bermaksud demikian menganiaya atau melakukan genosida terhadap dua orang minoritas di Kamboja. Hal ini juga menghambat proses sidang sekali lagi karena ECCC harus merespons secara lebih obyektif terhadap hal apa pun bukti baru ditemukan dan cari lebih banyak lagi bukti yang mendukung rencana genosida oleh rezim Khmer Merah.

KESIMPULAN

Dalam upaya penegakan hukum untuk seluruh warga Kamboja, khususnya pada dua kelompok menjadi korban genosida oleh Pol Pot, Kamboja bersama dengan hukum internasional lembaga penegak hukum sepakat untuk dibentuk lembaga peradilan untuk mengadili khususnya hukum pemecah kasus Khmer Merah di Kamboja dan sifatnya sementara. Dalam praktiknya, pendirian lembaga ini berjalan lambat karena banyak kendala yang datang dari Kamboja. Setelah menempuh perjalanan yang panjang proses, lembaga ini didirikan berhasil dan diberi predikat Luar Biasa Kamar di Pengadilan Kamboja. Faktanya, lembaga ini juga demikian dianggap lamban dalam menjalankannya tugas karena sulitnya menemukannya bukti-bukti yang memberatkan tersangka. Apalagi Perdana Menteri, Hunsen, seolah-olah memperlambat proses persidangan sepenuhnya. Dia karena faktor seperti orang yang ingin move on dari masa-masa buruk pada masa pemerintahan Pol Pot. Selain itu, ECCC jelas dapat mencapai tujuan utama pendiriannya, dengan mencoba 3 pelaku kejahatan Khmer Merah. Ini sukses sangat diapresiasi oleh Kamboja, khususnya kelompok yang menjadi korban Khmer Merah kejahatan rezim.

SARAN

Jurnal penelitian dapat fokus pada evaluasi kritis terhadap efektivitas Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja dalam mengadili pelanggaran hak asasi manusia Khmer Merah. Sorot aspek metode penyelidikan, transparansi proses, dan dampak keputusan. Sertakan analisis terhadap tantangan yang dihadapi pengadilan, respons masyarakat, serta implikasi terhadap rekonsiliasi nasional. Tinjauan literatur terkini dan perbandingan dengan pengadilan serupa dapat memperkaya konteks. Akhirnya, sarankan arah penelitian masa depan untuk meningkatkan mekanisme hukum yang lebih efektif dan memastikan keadilan bagi korban Khmer Merah.

REFERENCES

- BBC. "Khmer Rouge: Cambodia's Years of Brutality". <https://www.bbc.com/news/world-asiapacific10684399%20on%20June%203%202019> (accessed on June 3 2019).
- A.J Dommen. "The Indochinese Experience of The French and The Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam". Indiana: Indiana University Press, 2001.
- R. R. Ross and Library of Congress. "Federal Research Division, Cambodia: A Country Study". Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress, 1990.
- DK Constitution. "The Cambodian Constitutions (1953-1993)". https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/E3_259_EN.PDF, (accessed from on June 11, 2019).
- Cambodia tribunal Monitor. "Chronology of the Khmer Rouge Movement". <https://www.cambodiatribunal.org/history/cambodian-history/chronology-ofthekhmer-rouge-movement/> (accessed on June 9, 2019).
- Setyawan, Heru. "Kebijakan pemerintahan pol pot Di Kamboja tahun 1975-1979". p. 81. 2007.
- Ika Ningtyas. "Hybrid Tribunal Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat dalam Hukum Internasional". p. 5. 2016.
- Maxmanroe. "Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan Contoh Efektivitas". 2019. <https://www.maxmanroe.com/vid.manajemen/pengertian-efektivitas.html>, (accessed on June 2, 2019).
- BBC. "Pemimpin Khmer Merah didakwa Pengadilan Bersalah atas Genosida". 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia46232620%20on%20June%202>, (accessed on June 2, 2019).
- Teguh Firmansyah. "Sejarah Hari Ini: Mantan Diktator yang Bunuh 1,7 Juta Warga Kamboja Tutup Usia". 2016. https://www.republika.co.id/kanal/rama_dhan/ (accessed on June 2, 2019).
- Ardi Utomo. "Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah ini Dipenjara Seumur Hidup". 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/16/14481381/terbuktigenosida-2-pemimpin-khmer-merah-inidipenjara-seumur-hidup?page=all>, (accessed on June 2, 2019).
- Panda Surya Wijaya. "Setelah 40 tahun, keadilan akhirnya datang di Kamboja". 2018. <https://www.merdeka.com/dunia/setelah-40-tahun-keadilan-akhirnya-datang-dikamboja.html%20on%20June%202>, (accessed on June 2, 2019).